

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menghendaki suatu pembangunan ekonomi yang maju dan stabil. Sukirno dalam (Rapanna & Sukarno, 2017), mendefinisikan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang memadai yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Pengangguran merupakan isu yang kerap dihadapi oleh banyak negara terutama negara yang masih berkembang seperti Indonesia (Darmawan, 2018). Bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan peningkatan persediaan lapangan kerja (Adriyanto et al., 2020). Itulah yang menjadikan pengangguran menjadi isu pembangunan ekonomi yang krusial dan perlu segera ditangani.

Dilansir dari situs Kompas.com menurut Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan *World Economic Outlook 2024*, tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia mendapat posisi paling tinggi di antara enam negara ASEAN. Menurut laporan tersebut, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen, diatas Filipina yang sebesar 5,1 persen dan Malaysia yang berada pada angka 3,5 persen.

Pengangguran merupakan istilah bagi seseorang yang sudah mencapai usia kerja tetapi tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak (Apriandi & Arindi, 2023). Pengangguran juga dapat dikategorikan sebagai pilihan hidup individu yang secara sukarela menjadi seorang penganggur. Ada angkatan kerja yang memang menghendaki dirinya menganggur karena ingin mencari

pekerjaan impiannya ataupun hanya karena malas bekerja. Beberapa gambaran fenomena pengangguran ini disebut sebagai pengangguran sukarela.

Tingkat pengangguran yang tinggi akan memberikan dampak yang signifikan pada keberlangsungan suatu negara. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pemanfaatan sumber daya manusia menurun, penurunan produktivitas, serta berkurangnya pendapatan masyarakat. Pada kondisi ini, akan timbul tekanan ekonomi yang dapat memicu permasalahan-permasalahan lain muncul seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, ketidakstabilan emosi, peningkatan tingkat stres, serta gangguan kesehatan mental. Dampak-dampak tersebut dapat mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Jumhur, 2020).

Pengangguran terbuka merupakan keadaan individu usia kerja yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, atau sedang aktif mencari pekerjaan (Qamariyah et al., 2022). Pengangguran terbuka terjadi ketika lapangan kerja tidak dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia atau adanya ketidakcocokan antara tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, seperti perbedaan dalam kriteria pendidikan, gaji, keterampilan, usia, dan kriteria lainnya

Pengangguran terbuka merupakan permasalahan serius yang selalu menjadi perhatian Pemerintah karena dapat berdampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dapat ditinjau melalui data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Melalui data TPT tersebut, pemerintah Jawa Barat dapat menggunakan data tersebut untuk merumuskan suatu kebijakan dalam mengendalikan serta mengurangi tingkat pengangguran. Berikut data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat tahun 2009–2023.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009–2023

No.	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Perkembangan (Persen)
1.	2009	10,96	-
2.	2010	10,33	(5,74)
3.	2011	9,96	(3,52)
4.	2012	9,08	(8,88)
5.	2013	9,16	0,87
6.	2014	8,45	(7,73)
7.	2015	8,72	3,17
8.	2016	8,89	1,96
9.	2017	8,22	(7,54)
10.	2018	8,23	0,12
11.	2019	8,04	(2,31)
12.	2020	10,46	30,10
13.	2021	9,82	(6,12)
14.	2022	8,31	(15,38)
15.	2023	7,44	(10,47)
Rata-Rata			(2,25)

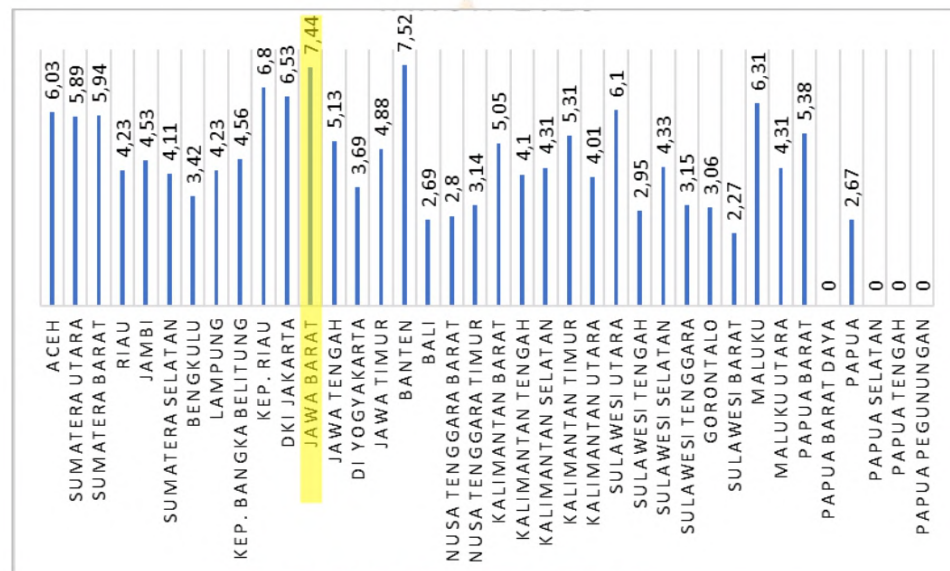
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Keterangan : () = Penurunan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2009–2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif menurun dengan rata-rata sebesar 2,25 persen. Tingkat pengangguran tertinggi yaitu pada tahun 2009 yang mencapai angka 10,96 persen. Selanjutnya, pada tahun 2020 tingkat pengangguran Jawa Barat kembali meningkat dengan tajam sebesar 30,10 persen dari tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran sebesar tingkat 10,46 persen. Peningkatan tingkat pengangguran ini sebagai dampak dari resesi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Sedangkan tingkat pengangguran terendah yang terjadi di Jawa Barat yaitu pada tahun 2023 sebesar 7,44 persen. Berdasarkan data tingkat

pengangguran terbuka diatas dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat cukup berhasil dalam mengurangi masalah pengangguran.

Jika dibandingkan dengan data Tingkat Pengangguran Terbuka seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,44 persen setelah Provinsi Banten di posisi tertinggi dengan angka sebesar 7,52 persen dengan selisih angka sebesar 0,12 persen. Berikut data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia Tahun 2023.



Gambar 1.1
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Berdasarkan data diatas, tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat masih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka dapat dipicu oleh beberapa faktor baik itu dari faktor perekonomian maupun dari faktor sumber daya manusia. Menurut (Suparmono, 2018), faktor-faktor yang menjadi penyebab pengangguran yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang melemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, serta strategi industri yang *labor saving*. Sedangkan menurut (Franita, 2016), faktor-faktor sumber

daya manusia yang menjadi penyebab pengangguran seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat upah yang tidak sesuai keinginan, maupun keengganan untuk bekerja.

Menurut (Widayati, et al., 2023), Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sudah diisi oleh pencari kerja. Kesempatan kerja mencerminkan besarnya permintaan atas tenaga kerja dengan mempertimbangkan faktor tingkat upah, posisi, dan persyaratan pekerjaan. Kesempatan kerja dapat diukur dengan membandingkan jumlah angkatan kerja yang terserap dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di suatu sektor ekonomi (Hardini & Soesatyo, 2017). Dengan kata lain, kesempatan kerja menunjukkan sejauh mana sektor-sektor ekonomi mampu menyediakan peluang bagi tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan.

Menurut analisa Keynes, kesempatan kerja sebagai dampak dari permintaan agregat memiliki hubungan negatif terhadap perkembangan pengangguran sebuah negara (Setiawan, 2019). Artinya jika tingkat permintaan agregat meningkat maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga menurunkan angka pengangguran. Provinsi Jawa Barat memiliki angka tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan cenderung naik tiap tahunnya. Berikut data tingkat kesempatan kerja provinsi Jawa Barat dari tahun 2009–2023.

Tabel 1.2
Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2023

No.	Tahun	Tingkat Kesempatan Kerja (Persen)	Perkembangan (persen)
1.	2009	89,04	-
2.	2010	89,67	0,71
3.	2011	90,04	0,41
4.	2012	90,92	0,98
5.	2013	90,84	(0,09)
6.	2014	91,55	0,78
7.	2015	91,28	(0,29)

No.	Tahun	Tingkat Kesempatan Kerja (Persen)	Perkembangan (persen)
8.	2016	91,11	(0,19)
9.	2017	91,78	0,74
10.	2018	91,77	(0,02)
11.	2019	91,96	0,20
12.	2020	89,54	(2,63)
13.	2021	90,18	0,72
14.	2022	91,69	1,68
15.	2023	92,56	0,95
Rata-rata			0,28

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Keterangan : () = Penurunan

Berdasarkan data Tabel 1.2, tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren peningkatan rata-rata sebesar 0,28 persen per tahun. Pertumbuhan tingkat kesempatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 92,56 persen. Sedangkan, tingkat kesempatan kerja terendah terjadi pada tahun 2009 dengan angka 89,04 persen. Pada tahun 2020, tingkat kesempatan kerja Provinsi Jawa Barat kembali mengalami peningkatan tajam sebesar 2,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan angka sebesar 89,54 persen, yang disebabkan oleh adanya resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kenaikan angka tingkat kesempatan kerja mencerminkan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi penerima kerja baik itu perusahaan, lembaga pemerintah, maupun sektor-sektor lainnya. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi akan memaksimalkan jumlah angkatan kerja yang terserap menjadi tenaga kerja aktif dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Provinsi Jawa Barat menunjukan adanya kinerja ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penting untuk mengukur kinerja pembangunan

ekonomi suatu wilayah (Azulaidin, 2021). Perekonomian suatu wilayah dikatakan bertumbuh apabila total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada wilayah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang sedang berjalan dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Menurut Amri, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara berkelanjutan menggambarkan bahwa perekonomian pada wilayah tersebut dapat berkembang dengan baik (Mushaddiq, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2009–2023 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomian Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2023

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Miliar Rupiah)	Perkembangan (persen)
1.	2009	303.405	-
2.	2010	322.224	6,20
3.	2011	965.622	199,67
4.	2012	1.028.410	6,50
5.	2013	1.093.544	6,33
6.	2014	1.149.216	5,09
7.	2015	1.207.232	5,05
8.	2016	1.277.312	5,81
9.	2017	1.343.662	5,19
10.	2018	1.419.624	5,65

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Miliar Rupiah)	Perkembangan (persen)
11.	2019	1.490.960	5,02
12.	2020	1.453.381	(2,52)
13.	2021	1.507.746	3,74
14.	2022	1.589.985	5,45
15.	2023	1.693.390	6,50
Rata-rata			4,88

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Keterangan : () = Penurunan

Dalam Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sempat menurun tajam sebesar - 2,52 persen akibat adanya resesi ekonomi pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Jawa Barat terjadi pada tahun 2023 dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp1.693.390 miliar rupiah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2009 yang hanya mendapat nilai PDRB ADHK sebesar Rp965.622 miliar rupiah. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat berhasil mengelola perekonomiannya sehingga pertumbuhannya dapat bertumbuh dengan baik.

Investasi juga menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan tingkat pengangguran. Suatu investasi berperan sebagai input modal bagi berjalannya suatu kegiatan ekonomi dan instansi (Wibowo, 2020). Investasi yang masuk dapat mendorong terbentuknya perusahaan baru dan mengembangkan perusahaan lama. Oleh karena itu, investasi merupakan aspek penting dalam suatu pertumbuhan ekonomi negara maupun daerah.

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal oleh seorang investor pada suatu bidang usaha tertentu. Investasi juga bukan hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga bersumber dari para investor pihak swasta dan luar negeri. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya kegiatan investasi dipisahkan dalam dua kategori, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Salah satu cara dalam berinvestasi yaitu investor dapat menanamkan dananya dalam bentuk saham pada pasar bursa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui tingkat pengembalian investasi (*return*) atau pendapatan (Priyanto, 2017).

Provinsi Jawa Barat membutuhkan suatu investasi agar dapat mengatur kegiatan pembangunan ekonominya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Berdasarkan data BPS, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat tahun 2009–2023 sebagai berikut.

Tabel 1.4
Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2023

No.	Tahun	Investasi (Miliar Rupiah)	Perkembangan (Persen)
1.	2009	4.724,9	-
2.	2010	15.799,8	234,39
3.	2011	11.194,3	(29,15)
4.	2012	11.384,0	1,69
5.	2013	9.006,1	(20,89)
6.	2014	18.726,9	107,94
7.	2015	26.272,9	40,29
8.	2016	30.360,2	15,56
9.	2017	38.390,6	26,45
10.	2018	42.278,2	10,13
11.	2019	49.284,2	16,57
12.	2020	51.400,5	4,29
13.	2021	59.948,5	16,63
14.	2022	80.808,3	34,80
15.	2023	88.012,9	8,92
Rata-rata			33,40

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Keterangan : () = Penurunan

Dalam Tabel 1.4, diketahui bahwa realisasi investasi PMDN Povinsi Jawa Barat tahun 2009–2023 secara umum mengalami peningkatan yang stabil tiap tahunnya. Realisasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai

investasi sebesar Rp 88.012,9 miliar rupiah. Sedangkan realisasi investasi terendah terjadi pada tahun 2009 dengan nilai investasi Rp 4.724,9 miliar rupiah. Diketahui pula bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan investasi yang tajam dengan perkembangan sebesar 34,80 persen. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat berhasil dalam menarik minat investor sehingga tingkat realisasi investasinya selalu bertumbuh tiap tahunnya.

Menurut pandangan Keynes menjelaskan bahwa suatu kegiatan perekonomian dapat dilihat dari segi suatu permintaan agregat yang tergantung pada belanja dan pengeluaran agregat suatu kegiatan ekonomi (Suparmono, 2018). Semakin tinggi permintaan agregat, semakin besar kemungkinan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, permintaan agregat menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran investasi perusahaan (I), dan pengeluaran pemerintah (G) (Wibowo, 2020). Ketika ketiga komponen pengeluaran ini meningkat, permintaan agregat dan penyerapan tenaga kerja otomatis ikut meningkat serta terdorongnya pertumbuhan ekonomi.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat pengangguran. Dalam variabel tingkat kesempatan kerja, Agnesia et al. (2023), menyatakan bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sebaliknya, penelitian Farrell & Atmanti (2023), menunjukan bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian oleh Adewi & Azhari (2022), yang menunjukan hasil bahwa tingkat kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Selanjutnya dalam variabel pertumbuhan ekonomi, penelitian Jubaedah & Amelia (2022), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sebaliknya, dalam penelitian Neno, *et al.*, (2024), mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Farrell & Amanti (2023), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Sedangkan dalam variabel investasi, penelitian Ramadhani & Ananda (2024), menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sebaliknya, berbeda dengan hasil penelitian Adewi & Azhari (2022), yang menjelaskan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berbeda kembali dengan penelitian Jubaedah & Amelia (2022), yang mendapatkan hasil bahwa investasi malah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui adanya inkonsistensi hasil penelitian dari variabel penelitian yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil temuan tersebut juga ada yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan Keynes dalam teori ekonominya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan kondisi empiris pada setiap wilayah penelitian walaupun dengan variabel penelitian yang sama. Oleh karena itu, untuk mengeksplorasi hubungan variabel-variabel ini di wilayah yang berbeda, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menganalisis konteks yang lebih mendalam.

Dengan mempertimbangkan inkonsistensi temuan-temuan dalam penelitian terdahulu serta mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi empiris di wilayah yang berbeda, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lanjutan di Provinsi Jawa Barat untuk menganalisis dan mengeksplorasi lebih mendalam hubungan antara tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas

dan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2009–2023.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi kedua dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Banten.
- b. Pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang melemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, serta strategi industri yang *labor saving*.
- c. Tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun tiap tahunnya.
- d. Tingkat kesempatan kerja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun tiap tahunnya.
- e. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2023 tumbuh dengan baik tiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2020 yang mengalami resesi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.
- f. Investasi Provinsi Jawa Barat pada awal periode mengalami fluktuasi. Lalu mulai dari tahun 2014-2023, realisasi investasi Provinsi Jawa Barat tumbuh dengan baik tiap tahunnya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan telaah latar belakang serta indentifikasi masalah yang telah peneliti kaji, maka penelitian ini akan dibatasi pada masalah tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023 dengan berfokus pada tiga dari lima faktor penyebab pengangguran menurut (Suparmono, 2018) yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, siklus bisnis yang melemah, dan rendahnya laju investasi produktif. Tiga faktor tersebut

kemudian dijadikan sebagai variabel independen yaitu tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

Tingkat kesempatan kerja dipilih sebagai variabel independen karena dapat dengan jelas menggambarkan seberapa besar peluang lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang konsisten bertumbuh tiap tahunnya turut menjadi alasan dibandingkan dengan tingkat pengangguran yang terjadi. Selain itu, investasi Jawa Barat yang telah bertumbuh secara signifikan tiap tahunnya juga menjadi relevan sebagai variabel pembanding tingkat pengangguran.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Apakah tingkat kesempatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023?
- b. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023?
- c. Apakah investasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023?
- d. Apakah tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta investasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023.

- c. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023.
- d. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta investasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam kajian mengenai tingkat pengangguran.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti sebagai media pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan. Melalui penelitian ini, peneliti dapat lebih memahami terkait tingkat mempengaruhinya.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pengangguran dan keterkaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009–2023. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat agar membuat kebijakan yang tepat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pembaca mengenai tingkat pengangguran dan bagaimana keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, agar pembahasan dapat terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar, maka penulis menyusun sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas Landasan Teori Penelitian, Literatur Review, Kerangka pemikiran, dan Pengembangan Hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menggambarkan secara terperinci Ruang Lingkup Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional variabel penelitian yang digunakan dan teknik analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil analisis objek penelitian yang ada.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.